

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Indeks Pembangunan Manusia

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan sebagai alat dari pembangunan.

Pembangunan manusia mempunyai arti yang luas, namun ide dasar dari pembangunan manusia adalah menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Oleh karena itu manusia harus diposisikan sebagai potensi kekayaan bangsa, sehingga pembangunan manusia diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*Human Development Report 2015*).

Konsep ini berbeda jika dibandingkan dengan konsep konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama kepada pertumbuhan ekonomi bukan pada pembangunan manusia.

Konsep pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pada peningkatan produk nasional dari pada memperbaiki kualitas hidup manusia. Konsep pembangunan sumber daya manusia melihat manusia sebagai alat atau input dari proses produksi, bukan sebagai tujuan akhir. Konsep kesejahteraan melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Sedangkan konsep kebutuhan hanya terfokus pada penyediaan barang dan jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukan memperluas pilihan-pilihan bagi masyarakat diberbagai bidang.

Sedangkan konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi. Sehingga pembangunan manusia yang dimaksudkan adalah suatu proses memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Antara lain yang terpenting adalah pilihan untuk berumur panjang dan sehat, pilihan untuk berilmu, pilihan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak (*Human Development Report 2015*).

Pembangunan manusia merupakan perwujudan pembangunan jangka panjang, yang meletakkan pembangunan disekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan. Pendekatan pembangunan manusia lebih memfokuskan pada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup secara bebas dan bermartabat. Pembangunan yang dimaksud oleh

UNDP bukan hanya sekedar perluasan pendapatan dan kesejahteraan tapi pembangunan manusia yang harus memfokuskan pada manusia.

Menurut *United Nation Development Programme (UNDP: 1995)*, dasar pemikiran konsep pembangunan manusia adalah :

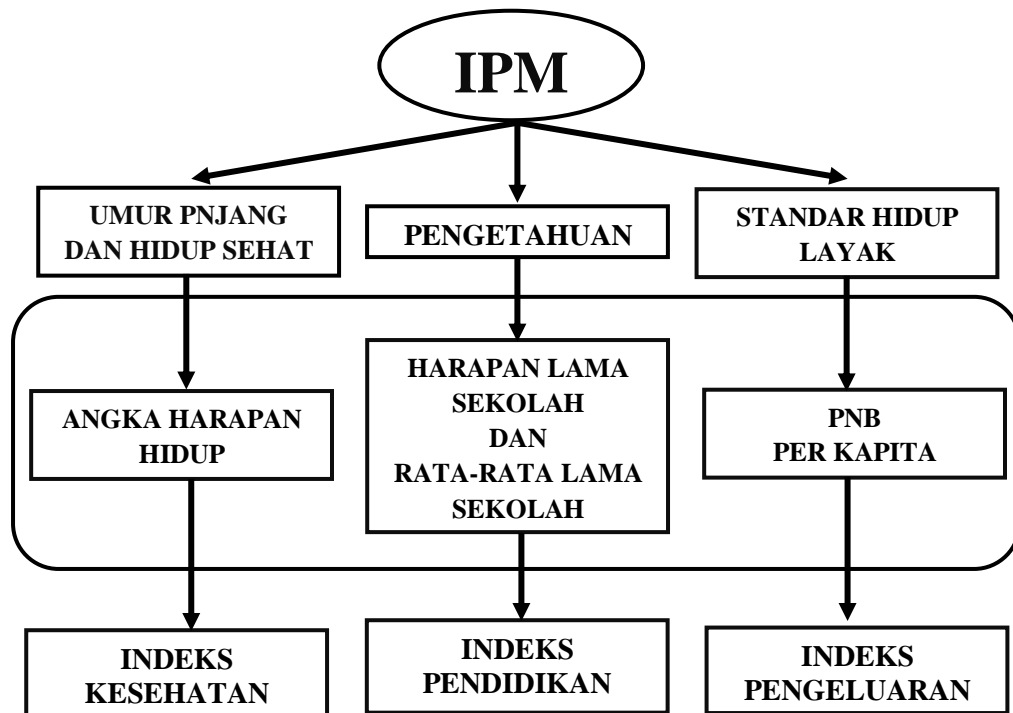
- a. Pembangunan harus mengutamakan manusia sebagai pusat perhatian.
- b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk atau masyarakat, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi konsep pembangunan manusia haruslah berpusat pada masyarakat secara komperhensif bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
- c. Pembangunan manusia bukan hanya meningkatkan kemampuan atau kapasitas manusia tapi juga memanfaatkan kemampuan atau kapasitas manusia dengan maksimal.
- d. Pembangunan manusia didukung dengan empat pilar pokok yakni: produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.
- e. Pembangunan manusia sebagai dasar dalam menentukan tujuan pembangunan dan digunakan untuk menganalisis pilihan yang ada untuk mencapainya.

Konsep pembangunan manusia inilah yang akhirnya melahirkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1990 dan sejak saat itu UNDP tidak pernah absen mencatat perkembangan pembangunan manusia diberbagai negara.

Indonesia sendiri mulai menghitung IPM sejak tahun 1996 hingga sekarang. Ada tiga dimensi pembentuk IPM yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standart hidup layak. Pada tahun 2010 UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM dengan merubah indikator yaitu dengan menggunakan komponen angka harapan hidup saat lahir (AHH), rata-rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah (HLS), dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita sedangkan BPS dalam menghitung standart hidup layak dengan menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*).

2. Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Ada tiga komponen yang digunakan untuk membentuk indeks pembangunan manusia komponen kesehatan atau indeks kesehatan yang dihitung menggunakan indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH), komponen pendidikan atau indeks pendidikan yang dihitung menggunakan indikator rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS), dan komponen standar hidup layak atau indeks pengeluaran yang dihitung menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang didapat dari produk nasional bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*).



Sumber : BPS Lampung, 2016

Gambar 2.1

Komponen-Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia

Gambar 2.1 di atas merupakan gambaran tentang pembentukan IPM dengan metode baru. Ada dua alasan yang menjadi dasar perubahan metodologi perhitungan IPM oleh BPS. Pertama angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan karna secara utuh tidak menggambarkan kualitas pendidikan sehingga digantikn dengan harapan lama sekolah. Penggantian tersebut dilakukan karna angka melek huruf di sebagian besar wilayah sudah tinggi, sehingga tidak dapat digunakan untuk membedakan tingkat pendidikan antara daerah dengan baik. Selain itu perhitungan indeks PDB per kapita diganti dengan PNB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan di suatu wilayah. Kedua,

penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi dengan capaian tinggi dari dimensi lain (BPS Lampung, 2016).

Komponen-komponen yang digunakan untuk membentuk indeks pembangunan manusia adalah :

a. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan merupakan indeks yang terdiri dari angka harapan hidup saat lahir (AHH), yaitu rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh oleh seorang selama hidup. Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun. Komponen AHH dihitung dengan cara berikut :

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

I = Indeks

AHH = Angka Harapan Hidup

b. Indeks Pendidikan

Ada dua indikator yang digunakan untuk menghitung indeks pendidikan, yaitu harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) dan rata-rata lama (*mean years of schooling*) sekolah. Harapan lama sekolah adalah perhitungan lamanya jumlah waktu sekolah (dalam

tahun) yang akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh oleh setiap anak. Sesuai dengan standar dari UNDP harapan lama sekolah memiliki batas maksimum 18 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Komponen HLS dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}} \dots\dots\dots (2)$$

Sedangkan rata-rata lama sekolah adalah perhitungan jumlah tahun yang digunakan penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sesuai dengan standar dari UNDP rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimum 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Komponen RLS dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}} \dots\dots\dots (3)$$

Kemudian indeks pendidikan diperoleh dari gabungan rata-rata lama sekolah dengan harapan lama sekolah. Komponen Indeks Pendidikan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2} \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan :

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-Rata Lama Sekolah

c. Indeks Pengeluaran

Indeks pengeluaran digunakan untuk mengukur kualitas hidup layak. Standar hidup layak adalah tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*). Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan. Untuk menghitung paritas daya beli (*purcashing power parity*) digunakan rumus sebagai berikut:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{1/m} \dots\dots\dots(5)$$

Keterangan :

PPP_j : paritas daya beli di wilayah j

P_{ij} : harga komoditas i di kabupaten/kota j

P_{ik} : harga komoditas i di kabupaten/kota k

m : jumlah komoditas

Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 yaitu Talikora-Papua dan daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025. Sedangkan batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM adalah sebesar Rp 26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436. Dalam penghitungan standar hidup layak BPS menggunakan rumus sebagai berikut :

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})} \dots\dots\dots(6)$$

Untuk menghitung nilai IPM berdasarkan komponen-komponen diatas menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100\dots(7)$$

Nilai IPM menunjukkan seberapa tingkat keberhasilan pembangunan manusia disuatu wilayah atau negara. IPM dapat digunakan menjadi salah satu tolak ukur apakah suatu negara termasuk negara maju, negara berkembang ataupun negara terbelakang. Selain itu IPM juga dapat digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat suatu negara.

IPM suatu negara dapat meningkat jika ketiga unsur itu dapat ditingkatkan, karena nilai IPM itu sendiri menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu negara. Menurut Tambunan yang dikutip dalam Kacaribu (2013) dengan kata lain, terdapat korelasi positif antara nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu negara. IPM memang bukanlah ukuran menyeluruh tentang pembangunan manusia, tetapi indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan.

3. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Manfaat indeks pembangunan manusia (IPM) menurut (Soleha, 2016) dapat digunakan untuk beberapa hal, antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk menyadarkan para pengambil keputusan agar lebih terfokus pada pencapaian manusia, karena IPM diciptakan untuk menjadi hal utama dalam pembangunan sebuah negara, bukan pertumbuhan ekonomi.
- b. Untuk mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan suatu negara. Bagaimana dua negara yang tingkat pendapatan perkapitanya sama dapat memiliki IPM yang berbeda.
- c. Untuk memperlihatkan perbedaan di antara negara-negara, di antara provinsi-provinsi (atau negara bagian), di antara gender, kesukuan, dan kelompok sosial ekonomi lainnya. Dengan memperlihatkan disparitas

atau kesenjangan di antara kelompok-kelompok tersebut, maka akan lahir berbagai debat dan diskusi di berbagai negara untuk mencari sumber masalah dan solusinya.

4. Hubungan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan Indeks Pembangunan Manusia

Upah merupakan salah satu sarana bagi pekerja untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Kebijakan upah minimum merupakan sistem penguapahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara (Sulistiawati, 2012). Kebijakan upah minimum dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Kedua sebagai proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktifitas (Simanjuntak, 2001).

Tujuan dari diberlakukannya upah minimum menurut (Sumarsono, 2003) ada 3, yaitu:

- a. Menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu.
- b. Meningkatkan produktifitas pekerja.
- c. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas perusahaan dengan cara efisiensi produksi.

Salah satu komponen dalam IPM adalah indeks pengeluaran, yaitu gambaran tentang kemampuan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Tentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar layak diperlukan pendapatan, pendapatan atau upah yang diperoleh oleh masyarakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Mankiw (2006) teori efisiensi upah (*efficiency-wage*) dibagi menjadi empat, antara lain sebagai berikut :

a. Upah yang tinggi akan memicu pekerja lebih produktif

Pengurangan upah akan menurunkan besaran upah yang dikeluarkan perusahaan terhadap pekerja, tetapi hal itu juga akan menurunkan produktifitas pekerja dan memangkas laba perusahaan.

b. Upah yang terlalu tinggi pula dapat menyebabkan perputaran tenaga kerja berkurang.

Dengan membayar upah yang tinggi akan membuat pekerja tetap bertahan, sehingga akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari dan melatih lagi pekerja yang baru.

c. Kualitas tenaga kerja ditentukan oleh besarnya upah.

Jika perusahaan melakukan pengurangan upah, maka akan membuat pekerja terbaik memilih bekerja di perusahaan lain sehingga menyisakan pekerja yang kurang terdidik.

d. Upah yang tinggi meningkatkan upaya pekerja.

Jika perusahaan tidak dapat melakukan pengawasan penuh terhadap pekerjanya dan setiap pekerja yang memutuskan sendiri bagaimana mereka akan bekerja keras maka dengan semakin tinggi upah yang diberikan akan membuat pekerja lebih bersemangat bekerja, karena pekerja akan mengalami kerugian jika sampai dipecat. Tingginya upah yang diberikan memotivasi pekerja untuk lebih giat bekerja untuk meningkat produktifitasnya.

Inti dari teori efisiensi upah adalah perusahaan akan beroperasi dengan lebih efisien jika perusahaan membayar pekerjanya dengan upah yang tinggi, hal itu membuat perusahaan menganggap mempertahankan upah diatas tingkat keseimbangan penawaran dan permintaan adalah hal yang menguntungkan.

Jika upah minimum meningkat akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, sehingga akan meningkatkan permintaan masyarakat juga akan naik. Pertambahan pendapatan akan menaikkan pengeluaran konsumsi, tambahan konsumsi dapat berupa makanan, non makanan, pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya akan ada efek pengganda atau pelipat (*Multiplier Effect*), peningkatan ini dapat meningkatkan pembangunan manusia. Pendidikan merupakan salah satu faktor dapat mempengaruhi tingkat upah, karena dengan pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mendapat pendapatan yang

lebih tinggi. Sehingga dengan pendidikan akan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk dapat memperoleh kesempatan agar dapat meningkatkan standar hidupnya.

Kesimpulannya jika upah yang didapatkan masyarakat bertambah, maka daya beli masyarakat juga akan semakin besar. Masyarakat dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan juga bertambah, masyarakat akan mampu membayar biaya perawatan dan pemeliharaan kesehatannya sehingga produktifitasnya akan meningkat. Masyarakat akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat, dan tentu dengan adanya kenaikan upah akan menaikkan tingkat kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat sehingga akan meningkatkan pembangunan manusia.

5. Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah merupakan pengeluaran untuk barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Sukirno (2000) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan sebuah kebijakan fiskal., yakni tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian di suatu daerah setiap tahun yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk skala regional dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) untuk skala nasional. Kebijakan fiskal ini bertujuan untuk menstabilkan harga, tingkat output, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Menurut Mangkoesoebroto (1999), kebijakan

pemerintah dicerminkan melalui belanja pemerintah. Ketika pemerintah menetapkan kebijakan pembelian barang dan jasa, belanja pemerintah mencerminkan biaya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Model pembangunan tentang perkembangan belanja pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan belanja pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi yang diklasifikasikan menjadi tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal, pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, pemerintah tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Pada tahap ini, akan banyak terdapat masalah akibat investasi pihak swasta. Pemerintah turun tangan untuk mengatur dan mengurangi dampak negatif dan melindungi buruh lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Pada tahap lanjut, Rostow menyatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyedia prasarana ke pengeluaran untuk aktivitas sosial.

Menurut Dumairy (1999) ada empat peran yang dimiliki pemerintah, yaitu :

a. Alokatif

Peran alokatif merupakan peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang sudah ada agar lebih optimal pemanfaatannya sehingga mendukung produksi yang efisien.

b. Distributif

Peran distributif merupakan peran pemerintah untuk mendistribusikan sumber daya, kesempatan, dan hasil ekonomi secara adil.

c. Stabilitatif

Peran stabilitatif merupakan peran pemerintah untuk memelihara stabilitas ekonomi dan memulihkan jika dalam keadaan tidak seimbang.

d. Dinamisatif

Peran dinamisatif merupakan peran pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar mengalami kemajuan.

6. Hubungan Antara Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan, Pendidikan , dan Fasilitas Umum dengan IPM

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno,2000) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya

membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Manusia dalam perannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain berperan sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan itu sendiri.

Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas juga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan. Oleh sebab itu peranan pemerintah melalui fungsi alokasi, yakni melalui pengeluaran atau belanja di berbagai sektor antara lain di bidang kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum dengan mempertimbangkan prioritas sasaran yang tepat guna adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dimana ini juga merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu. Beberapa acuan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Penelitian Basuki dan Saptutyarningsih (2016) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2008-2014 (Studi Kasus Kab/Kota D I Yogyakarta)”. Menggunakan variabel independen pendapatan per kapita, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, pengeluaran pemerintah untuk fasilitas umum, rasio gini dan

jumlah penduduk miskin di 5 kabupaten/kota di DIY dengan rentan waktu 7 tahun yakni 2008-2014. Dengan menggunakan metode data panel dan di peroleh hasil bahwa variabel pendapatan per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di DIY. Variabel pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM di DIY. Variabel rasio gini dan jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan dan negatif terhadap IPM di DIY.

2. Penelitian Ilyas, Paddu, dan Suhab. (2013) yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sinjai”. Menggunakan variabel independen Belanja sektor pendidikan, belanja sektor kesehatan dan tingkat pendidikan sektor pertanian dengan rentan waktu 13 tahun yakni 2001-2013. Dengan menggunakan metode analisis *Two Stage Least Squares* dan diperoleh hasil variabel belanja sektor pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM kabupaten Sinjai. Variabel belanja sektor kesehatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM kabupaten sinjai. Variabel tingkat pendidikan sektor pertanian berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Penelitian Yusri (2010) yang berjudul “Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Aceh. Menggunakan variabel independen pengeluaran rumah tangga, pengeluaran rumah tangga bukan makanan, rasio penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di Provinsi Aceh dengan periode 5 tahun. Menggunakan metode data panel diperoleh hasil bahwa variabel independen pengeluaran rumah tangga, pengeluaran rumah tangga bukan makanan, rasio penduduk miskin dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Aceh. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Aceh.
4. Penelitian Nur, Hamzah, dan Mauriza (2013) yang berjudul “Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Barat dan Kawasan Timur Provinsi Aceh”. Menggunakan variabel independen pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di kawasan barat dan kawasan timur Provinsi Aceh dengan periode 5 tahun yakni 2006-2010. Menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis kualitatif dan diperoleh hasil bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM di kawasan barat dan timur Provinsi Aceh.

5. Penelitian Hanly, Rumate, dan Septiana (2015) yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara”. Menggunakan variabel independen pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara. Menggunakan metode regresi berganda dan diperoleh hasil variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM Sdi Provinsi Sulawesi Utara. Variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Utara.
6. Penelitian Pratowo (2011) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia”. Menggunakan variabel independen belanja daerah, gini rasio, pengeluaran non makanan, dan rasio ketergantungan di Provinsi Jawa Tengah. Menggunakan metode data panel dan diperoleh hasil bahwa variabel belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah, variabel gini rasio berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah, variabel konsumsi non-makanan berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah, Variabel rasio ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.
7. Penelitian Kacaribu (2013) dengan judul “Analisis Indeks Pembangunan Manusia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi di Provinsi Papua”. Menggunakan Variabel independen produk domestik regional bruto

(PDRB), pengeluaran pemerintah menurut fungsi pendidikan, rasio jumlah penduduk terhadap jumlah dokter, rasio jumlah penduduk terhadap jumlah bidan, rasio jumlah penduduk terhadap jumlah perawat, rasio kemiskinan terhadap jumlah penduduk, rasio murid SD terhadap guru, rasio murid SMP terhadap guru, rasio murid SMA terhadap guru di 29 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua dengan periode 3 tahun. Menggunakan metode data panel dengan pendekatan *fixed effect model* diperoleh hasil variabel PDRB, pengeluaran pemerintah menurut fungsi pendidikan, rasio jumlah penduduk terhadap dokter, rasio jumlah penduduk terhadap bidan, rasio jumlah penduduk terhadap perawat, rasio kemiskinan terhadap jumlah penduduk dan rasio murid SMA terhadap guru berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Papua. Sedangkan variabel rasio murid SD terhadap guru dan rasio murid SMP terhadap guru tidak berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Papua.

8. Penelitian Prasetyo (2017) yang berjudul “Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia”. Menggunakan variabel independen realisasi belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan, realisasi belanja pemerintah daerah fungsi kesehatan, dan realisasi belanja pemerintah daerah fungsi infrastruktur periode tahun 2015. Menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan diperoleh hasil variabel realisasi belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berpengaruh positif terhadap IPM se-Sumatra.

9. Penelitian Basnawi (2017) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun Tahun 2010-2015”. Menggunakan variabel independen jumlah penduduk miskin, rasio gini, dan upah minimum kab/kota dengan periode 6 tahun yakni 2010-2015. Menggunakan metode data panel dan diperoleh hasil variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, variabel Rasio Gini berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, variabel Upah Minimum Kab/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Eks Karesidenan Madiun.

10. Penelitian Adelfina dan I Made Jember (2015) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005-2013”. Menggunakan variabel independen pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan belanja daerah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menggunakan metode data panel dengan teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan variabel kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Beberapa hasil penelitian terdahulu di atas yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Analisis
1.	Basuki dan Saptutyarningsih (2016) “Analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2008-2015 (<i>studi kasus kabupaten/kota DI Yogyakarta</i>)”.	Dependen : 1. IPM Independen : 1. Pendapatan Perkapita 2. Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan 3. Pengeluaran pemerintah Untuk Fasilitas Umum 4. Rasio Gini 5. Jumlah Penduduk Miskin	Regresi Data Panel	1. Variabel Pendapatan Perkapita tidak berpengaruh signifikan 2. Variabel Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan berpengaruh signifikan dan positif 3. Variabel Pengeluaran Pemerintah Untuk Umum berpengaruh signifikan dan positif 4. Variabel Rasio Gini berpengaruh signifikan dan negative 5. Variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan dan negatif
2.	Suhab, Hamid, dan Ilyas (2013) ” Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sinjai”.	Dependen : 1. IPM dan PE Independen : 1. Belanja Sektor Pendidikan 2. Belanja Sektor Kesehatan 3. Tingkat pendidikan sektor pertanian	Two Stage Least Squares	1. Variabel Belanja sektor pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM 2. Variabel Belanja sektor Kesehatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM 3. Variabel Tingkat pendidikan sektor pertanian berpengaruh signifikan dan positif terhadap PE

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Analisis
3.	Yusri (2014) “Analisis Determain Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Aceh”.	Dependen : 1. IPM Independen : 1. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan 2. Pengeluran pemerintah bidang pendidikan 3. Pengeluaran rumah tangga 4. Pengeluaran rumah tangga non makanan 5. Penduduk miskin	Regresi Data Panel	1. Variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan 2. Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan 3. Variabel pengeluaran rumah tangga berpengaruh signifikan 4. Variabel pengeluaran rumah tangga non makanan berpengaruh signifikan 5. Variabel rasio penduduk miskin berpengaruh signifikan
4.	Nur, Hamzah, dan Mauriza. (2013) “Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Barat dan Kawasan Timur Propinsi Aceh”.	Dependen : 1. IPM Independen : 1. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan 2. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan	Deskriptif kualitatif Random Effect	1. Variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan signifikan dan positif terhadap IPM 2. Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Analisis
5.	Hanly, Rumate, dan Septiana (2014) “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara	Dependen : 1. IPM Independen : 1. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan 2. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan	Regresi Linear Berganda	1. Variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia 2. Variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif
6.	Pratowo (2010) “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia” (<i>studi kasus 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah</i>)”.	Dependen : 1. IPM Independen : 1. Belanja Daerah 2. Gini Rasio 3. Pengeluaran non-Makanan 4. Rasio Ketergantungan	Regresi Data Panel	1. Variabel Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM 2. Variabel Gini Rasio berpengaruh signifikan terhadap IPM 3. Variabel konsumsi non-makanan berpengaruh signifikan terhadap IPM 4. Variabel rasio ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap IPM di provinsi Jawa Tengah.

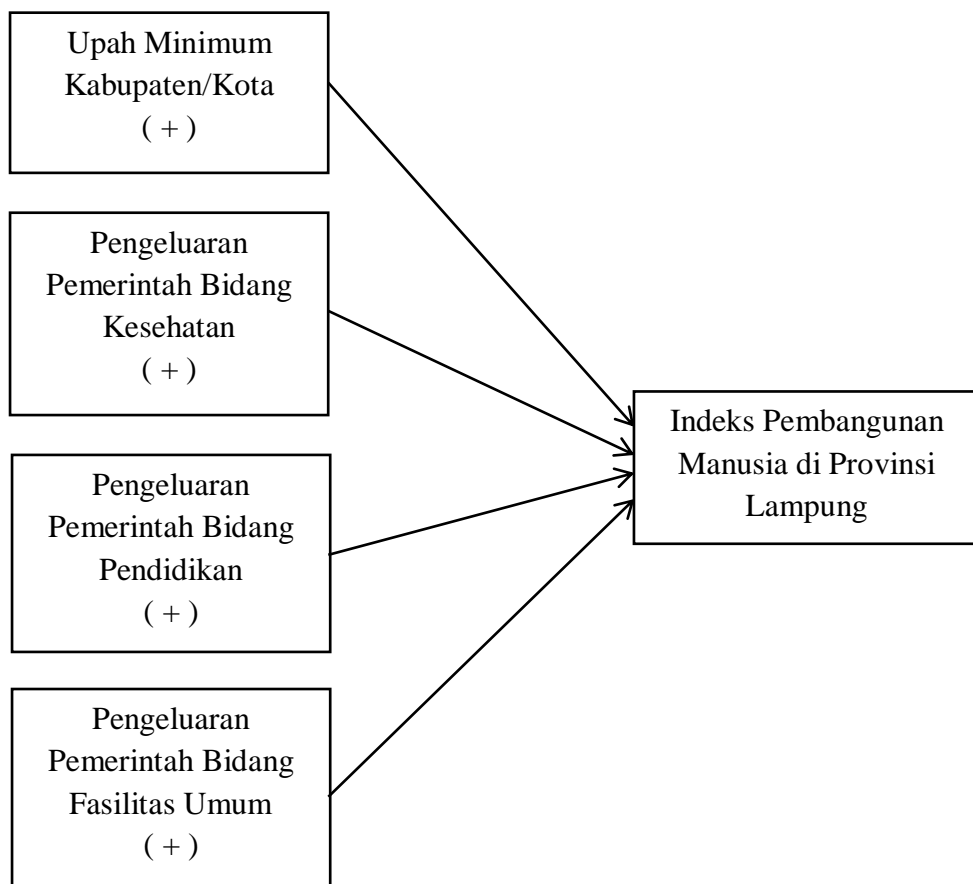
No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Analisis
7.	Kacaribu (2013) “Analisis Pembangunan Manusia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi di Provinsi Papua”.	Dependen : 1. IPM Independen : 1. PDRB 2. Pengeluaran Pemerintah menurut fungsi pendidikan 3. Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah dokter 4. Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah bidan 5. Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah perawat 6. Rasio kemiskinan terhadap jumlah penduduk 7. Rasio murid SD terhadap guru 8. Rasio murid SMP terhadap guru 9. Rasio murid SMA terhadap guru	Regresi Data Panel	1. Variabel PDRB berpengaruh signifikan 2. Variabel pengeluaran pemerintah menurut fungsi pendidikan berpengaruh signifikan 3. Variabel rasio jumlah penduduk terhadap dokter berpengaruh signifikan 4. Variabel rasio jumlah penduduk terhadap bidan berpengaruh signifikan 5. Variabel rasio jumlah penduduk terhadap perawat berpengaruh signifikan 6. Variabel rasio kemiskinan terhadap jumlah penduduk berpengaruh signifikan 7. Variabel rasio murid SMA terhadap guru berpengaruh signifikan 8. Variabel rasio murid SD terhadap guru tidak berpengaruh terhadap IPM 9. Variabel rasio murid SMP terhadap guru tidak berpengaruh terhadap IPM

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Analisis
8.	Prasetyo (2017) “Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia”. (<i>studi kasus seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra</i>)	Dependen : 1. IPM Independen : 1. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Fungsi Pendidikan 2. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Fungsi Kesehatan 3. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Fungsi Infrastruktur	Regresi linear Berganda	1. Variabel Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Fungsi Pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM 2. Variabel Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Fungsi Kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM 3. Variabel Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Fungsi Infrastruktur berpengaruh positif terhadap IPM Kab/Kota di Pulau Sumatra.
9.	Basnawi (2017) “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun Tahun 2010-2015”.	Dependen : 1. IPM Independen : 1. Jumlah Penduduk Miskin 2. Rasio Gini 3. Upah Minimum Kab/Kota	Regresi Data Panel	1. Variabel Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM 2. Variabel Rasio Gini berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM 3. Variabel Upah Minimum Kab/Kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Analisis
10.	Adelfina dan I Made (2015) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005-2013”.	Dependen : 1. IPM Independen : 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Kemiskinan 3. Belanja Pemerintah Daerah	Regresi Linear Berganda	1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan 2. Variabel Kemiskinan berpengaruh negatif signifikan 3. Variabel Belanja Pemerintah Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap IPM

C. Metode Penelitian

Pada pembahasan ini penulis akan memaparkan model penelitian yang menjadi dasar sekaligus alur berpikir dalam melihat pengaruh variabel penentu Indeks Pembangunan Manusia. Maka peneliti menggambarkan variabel-variabel yang akan diteliti dalam keangka berfikir sebagai berikut :



Gambar 2.2

Kerangka Konseptual Penelitian

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau simpulan yang diambil berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Perubahan indikator pada variabel upah minimum kabupaten/kota diduga berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Lampung
2. Perubahan indikator pada variabel Belanja pemerintah daerah di bidang kesehatan diduga berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Lampung
3. Perubahan indikator pada variabel Belanja pemerintah daerah di bidang pendidikan diduga berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Lampung
4. Perubahan indikator pada variabel Belanja pemerintah daerah di bidang fasilitas umum diduga berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Lampung.